

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Oleh:

ANDRYAN PUTRA PRATAMA^{1*}

NIM. E1011151132

Sri Maryuni², Dhidik Apriyanto²

*Email: andryanputrapratama@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, yang bertujuan untuk dapat memberi pemahaman mengenai Implementasi Pencatatan Kelahiran di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Berdasarkan adanya fenomena masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran dan minimnya informasi yang didapatkan tentang pentingnya akta kelahiran. penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. penelitian ini menggunakan teori Edward III Ada 4 faktor yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. hasil penelitian ini kurang maksimalnya Implementasi Pencatatan Kelahiran di Kecamatan Ngabang disebabkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat yang menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai pencatatan kelahiran sangat minim sekali. dalam mengimplementasikan pencatatan kelahiran. penyaluran informasi tentang pentingnya akta kelahiran harus disampaikan disdukcapil secara rutin untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran, selain itu peran masyarakat sangatlah penting untuk dapat berpartisipasi dalam mengimplementasikan pencatatan kelahiran di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Kata Kunci: Implementasi, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

POLICY IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION IN NGABANG SUB-DISTRICT, LANDAK REGENCY

By:

ANDRYAN PUTRA PRATAMA ^{1*}

NIM : E1011151132

Sri Maryuni², Dhidik Apriyanto²

*Email: andryanputrapratama@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Tanjungpura University
2. Lecturer of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Tanjungpura University

ABSTRACT

The research is entitled Policy Implementation of Population Administration in Ngabang Sub-District, Landak Regency. It aims to provide understanding of the implementation of birth registration in Ngabang Sub-District, Landak Regency. The research is based on the large number of people who do not possess birth certificates and the lack of information about the importance of birth certificates. This research uses descriptive research with qualitative method. Techniques of data collection include interview and observation techniques. This research uses a theory by Edward III. There are 4 factors in this research which consist of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Research results indicate that the lack of implementation of birth registration in Ngabang Sub-District is caused by the lack of information for the community which causes low level of understanding. The importance of birth certificates must be delivered by Civil Registry Service Office routinely in order to provide information or understanding to the community about the importance of birth certificates. In addition, the role of the community is very important in implementing birth registration in Ngabang Sub-District, Landak Regency.

Keywords: Implementation, Community, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2010 yang mengatur tentang Administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah suatu rangkaian kegiatan pencatatan sipil, akta catatan sipil adalah catatan autentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian, pengangkatan anak/adopsi, kematian, serta kelahiran. Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak dari identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum, Di berbagai daerah masih banyak terjadi anak-anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran, akibatnya banyak pula anak yang kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial.

Pembuatan akta kelahiran adalah wajib karena berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna

mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang sudah dicetak dan mengacu kepada setiap catatan resmi berlandaskan undang-undang yang resmi dan menetapkan hal-hal mengenai kelahiran seorang anak. Seperti yang tertuang ke dalam Perda Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Landak.

Dijelaskan pada Perda Kabupaten Landak tentang Pencatatan Kelahiran di wilayah Kabupaten Landak (pasal 63) bahwa setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil atau instansi pelaksana mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan tempat domisili ibunya, di luar tempat domisili ibunya, orang asing pemegang izin

kunjungan, dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Adapun fenomena yang dianggap perlu diperhatikan dalam Implementasi kebijakan tersebut adalah jumlah kepemilikan akta kelahiran sangatlah minim di bandingkan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Ngabang, hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kelahiran. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran sangat mungkin dapat dipalsukan identitasnya untuk berbagai kepentingan, dari hal tersebut maka dapat diartikan bahwa begitu penting akan akta kelahiran bagi manusia antara lain sebagai identitas diri, administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, untuk keperluan sekolah, untuk pendaftaran pernikahan, mendaftar pekerjaan, persyaratan pembuatan paspor, untuk mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus hak dana pensiun, mengurus tunjangan keluarga. Dapat dilihat begitu banyak manfaat dari akta kelahiran tersebut. Dalam proses penyampaian informasi pihak Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sudah melakukannya ke tiap Kelurahan di Kecamatan Ngabang. Namun penyampaian

informasi yang dilakukan tidak rutin atau jarang, hanya saja sewaktu-waktu di perlukan dan pada saat tugas turun lapangan yang diminta oleh kepala lurah. Masyarakat sendiri sebenarnya sudah banyak mengetahui tentang pelaksanaan hal tersebut dari pihak capil, akan tetapi masyarakat disaat ada kepentingan saja baru mau mengurus akta kelahiran. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan akta kelahiran tersebut.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Masih banyak masyarakat Kecamatan Ngabang yang belum memiliki akta kelahiran yaitu berjumlah 97,37 % dari jumlah yang memiliki yaitu 2,62 %.
2. Minimnya informasi yang didapatkan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada: Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Landak yang terdapat pada pasal 63 tentang Pencatatan Kelahiran.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Implementasi Pencatatan Kelahiran di Kecamatan Ngabang yang kurang berhasil?

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Pencatatan kelahiran di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak kurang berhasil.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dibidang

kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peningkatan kinerja instansi yang berhubungan dengan Pencatatan dan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

b. Bagi pihak masyarakat, hasil dari penelitian ini bisa memberikan pengetahuan tentang pentingnya disposisi (sikap pelaksana) yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuat akta kelahiran di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori

a. Kebijakan Publik

Menurut Nurcholis (dalam Tahir 2014: 24) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal ini:

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan.
2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

b. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Grindle (dalam Pasolong, 2014: 57) teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. jika tidak ada implementasi, kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan dalam arsip, tanpa implementasi kebijakan tidak akan bisa

mewujudkan hasilnya. Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2012:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino Leo, 2008: 149-153) yaitu terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah satu pengertian (mis komunikasi), hal tersebut

di sebgiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

b. Kejelasan

Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyewengkantujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi

Pemerintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu perintah yang diberikan sering berkomunikasi haruslah kosisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf

Sumber utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salahsatunya disebagiankan oleh karna staf yang tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan untuk ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para implementor dimana publik tidak terlegitimasi sehingga dapat mengandalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana atau prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam proses implementasi kebijakan sangat diperlukan, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakanyang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

d. Indikator Efektivitas Kerja

Malayu Hasibuan (2003: 105) menyatakan ada 3 indikator efektivitas kerja sebagai berikut:

1. Kuantitas Kerja

Kuantitas Kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja. Setiap organisasi selalu berusaha supaya efektivitas kerja dari pegawainya dapat ditingkatkan.

2. Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh pegawai berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan pekerjaan.

3. Pemanfaatan Waktu

Setiap pegawai harus dapat menggunakan waktu seefisien mungkin, dengan cara datang tepat waktu ke kantor dan berusaha untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan waktu selama penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan organisasi.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja Pegawai

Richard M. Steers dalam (Umam 2012: 351) mengemukakan ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja yaitu:

1. Karakteristik Organisasi

Richard M. Steers mengatakan bahwa karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, atau dapat dikatakan bahwa struktur organisasi menggambarkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran. Dengan teknologi yang tepat akan menunjang kelancaran organisasi didalam mencapai sasaran.

2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan

pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan interen, yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

Karakteristik lingkungan berpengaruh terhadap organisasi karena adanya ketergantungan organisasi terhadap sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan, organisasi mempunyai ketergantungan ganda terhadap lingkungannya. Lingkungan organisasi secara umum diartikan sebagai sesuatu yang tidak berhingga (infinite) dan mencakup seluruh elemen yang terdapat diluar atau didalam suatu organisasi. keseluruhan.

3. Karakteristik Pekerja

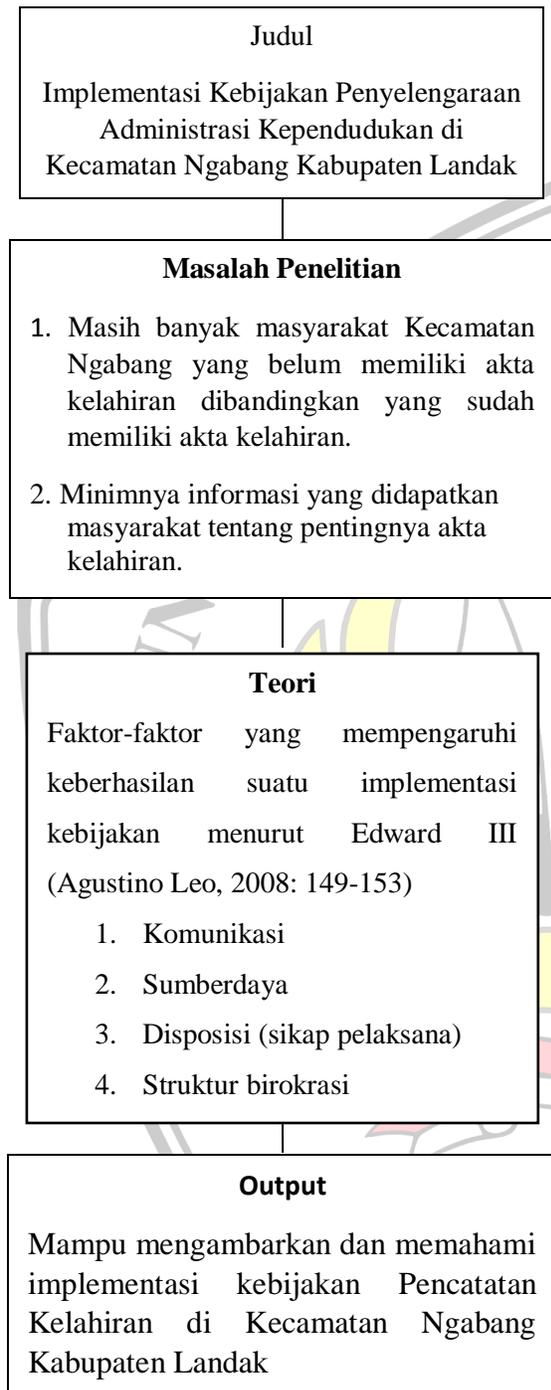
Richard M. Steers menyatakan bahwa faktor pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Peran sumber daya manusia dalam organisasi sebagai pegawai memegang peranan yang menentukan karena hidup matinya suatu organisasi pemerintah semata-mata tergantung pada pegawainya. Sumber daya manusia yang cukup memiliki kemampuan menciptakan dan menghasilkan gagasan, memiliki kreativitas, berinisiatif, berkemampuan

memecahkan masalah, memiliki wawasan kedepan, keterampilan dan keahlian merupakan wujud dari manusia yang potensial dan berkualitas, yang harus dimiliki oleh organisasi agar dapat mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pegawai merupakan faktor penentu dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah secara efektif dan efisien. Pegawai merupakan penggerak kegiatan dalam suatu organisasi/instansi.

4. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen

Karakteristik kebijakan dan praktek manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang didalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi.

2. Alur Pikir Penelitian



1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian secara deskriptif dimana peneliti ini menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan fakta. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Maka, dengan metode penelitian kualitatif ini dihasilkan data yang kemudian peneliti berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara mendalam terhadap fenomena-fenomena di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan agustus 2019 hingga febuari 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten landak.

2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Landak.
3. Staf/ Pegawai Disdukcapil Kabupaten Landak
4. Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, karena kelahiran sehingga dianggap penting dan perlu untuk diteliti mengingat administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Adapun alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa data di lapangan model Miles dan Huberman (dalam Sugiono

2007: 91) yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum kata-kata yang penting, kemudian penyajian data (*data display*) dilakukan dengan kalimat yang singkat atau uraian yang singkat, dan yang terakhir verifikasi data (*conclusion drawing/ verification*) dengan menarik kesimpulan dari masing-masing data yang ada.

6. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

D. HASIL PENELITIAN

Implementasi pencatatan kelahiran merupakan peraturan daerah tentang administrasi kependudukan yang

direalisasikan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2010 mengatur tentang administrasi kependudukan, yang dijelaskan pada Pencatatan kelahiran (pasal 63) bahwa setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil atau instansi pelaksana mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan tempat domisili ibunya, di luar tempat domisili ibunya, orang asing pemegang izin kunjungan, dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya. Pembuatan akta kelahiran ini merupakan kebijakan pemerintah yang memang harus direalisasikan bagi setiap daerah demi tercapainya tujuan negara untuk melaksanakan tertib administrasi bagi masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Landak. Tidak bisa dipungkiri

bahwa setiap kebijakan dan setiap pembentukan kehidupan sering kali mengalami kendala yang tidak jarang menghambat bahkan menghentikan suatu proses kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan dampak yang dapat merugikan pihak implementor selaku unsur pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam implementasi program akta kelahiran masih belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. Kecamatan Ngabang baru mencapai 2,62% dan sisanya 97,37%. Saat ini banyak masalah-masalah yang bisa saja menjadi penghambat dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian dan fokus penelitian yakni tentang implementasi kebijakan pencatatan kelahiran di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, maka untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pengimplementasian kebijakan pencatatan kelahiran di Kecamatan Ngabang peneliti menggunakan salah satu model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Edward III yang membahas empat faktor sebagai berikut :

1. Komunikasi

proses komunikasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sudah berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan untuk memberikan informasi mengenai peraturan Daerah nomor 7 tahun 2010 Tentang Administrasi kependudukan Informasi yang diberikan agar staf/pegawai pencatatan sipil memahami tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa informasi yang dimiliki staf/pegawai sudah cukup jelas untuk melaksanakan tugasnya.

Proses komunikasi yang terjadi belum optimal, karena dalam proses penyaluran informasi dilakukan secara tidak rutin atau jarang dilakukan. Informasi yang diberikan belum diketahui oleh semua masyarakat pada saat penyampaian informasi tentang pentingnya akta kelahiran. Masyarakat juga tidak memahami apa itu pencatatan kelahiran dikarenakan informasi dari implementor yang kurang dipahami apa maksud dan tujuannya.

2. Sumberdaya

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sumberdaya manusia

(staf) Disdukcapil Kabupaten Landak kurang memadai. Faktor penentu lain yakni dana/anggaran, apabila implementor kekurangan dana/anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut, implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Karena sumber daya manusia dan dana/anggaran adalah faktor penting untuk menjalankan proses implementasi tersebut agar berjalan efektif. masyarakat pun mengatakan dalam penerimaan berkas dari disdukcapil tidak langsung diproses sehingga akta kelahiran yang seharusnya jadi dalam waktu 14 hari kerja tapi dalam kenyataannya pembuatan akta kelahiran jadi 2-3 bulan baru jadi.

informasi yang dimiliki staf/pegawai Disdukcapil untuk melaksanakan kebijakan tersebut sudah dan memahami apa yang dilaksanakan. Masyarakat pun mengatakan pada saat pembuatan akta staf/pegawai memberikan informasi atau syarat-syarat pembuatan akta. Namun untuk Perda, masyarakat belum mengetahui karena informasi yang diterima dari Disdukcapil belum optimal dalam hal penyampaian informasi, Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat bahwa kurangnya informasi dari Disdukcapil.

fasilitas dalam ketersediaan yang cukup guna menunjang pelaksanaan kebijakan pembuatan akta kelahiran tersebut cukup memadai karena masing-masing mempunyai satu unit komputer sesuai dengan keperluan yang diperlukan. Hanya saja kendala pada jaringan saat entry data yang membuat pembuatan akta kelahiran itu menjadi lambat diproses. Fasilitas dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kebijakan sehingga dalam proses implementasinya menjadi mudah dilakukan.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Pelaksana kebijakan yaitu Disdukcapil dalam menerapkan peraturan kebijakan tersebut sudah mengarahkan dan memberikan informasi kepada staf atau pegawainya agar bersikap sopan dan ramah dalam menyampaikan informasi mengenai pembuatan akta kelahiran. Jika ditemukan adanya pelanggaran Disdukcapil bertindak langsung kepada staf atau pegawai dengan memberikan teguran. Sikap Disdukcapil dalam melakukan teguran kepada staf atau pegawai yang melakukan pelanggaran harus lebih tegas, karena menurut masyarakat masih ada staf atau pegawai yang tidak ramah kepada masyarakat.

Kecendrungan dari sikap pelaksana kebijakan yaitu Disdukcapil merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya bila tingkah laku prespektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada dalam pengimplementasian program ini tertata dengan baik dan berkesinambungan serta memiliki hierarki yang baik. Dengan adanya pembagian kewenangan dalam setiap bagian organisasi sehingga pelaksanaan program ini dapat terbantu dan dipermudah dengan adanya pembagian tugas serta wewenang dalam pelaksanaannya. Terlihat dari adanya pihak kelurahan sehingga adanya hubungan baik dari setiap instansi di pemerintah. Kelurahan yang dapat mendukung terlaksananya implementasi kebijakan

pemerintah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Serta koordinasi antara staf dengan pegawai dalam pembuatan akta kelahiran sudah berkoordinasi agar yang dilaksanakan dapat tercapai dengan peraturan kebijakan.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan kesimpulan atau analisis yang telah dilakukan terkait penelitian tentang Implementasi Pencatatan kelahiran Di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan kajian teori dari George C. Edward III yang memiliki empat faktor yaitu komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Empat faktor tersebut digunakan peneliti untuk menganalisis sehingga penelitian ini dapat disimpulkan.

1. Komunikasi

Dalam mengimplementasikan pencatatan kelahiran di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Disdukcapik kurang berhasil. Penyaluran informasi dan konsistensi penyampaian Perda tersebut dari staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat dengan penyaluran informasi disetiap kelurahan

yang dilakukan pada saat turun lapangan tidak rutin, hal ini terlihat sebagian masyarakat tidak memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut dilaksanakan karena informasi yang diberikan oleh staf/pegawai dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat tentang kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

2. Sumber Daya

Dalam Implementasi Kebijakan akta kelahiran selain adanya masyarakat sebagai sasaran juga perlu adanya tenaga implementor yang berkompeten dengan jumlah yang cukup agar pelaksana program ini dapat terlaksana. Implementor yang dimiliki untuk saat ini tidak semua berkompeten. Dalam hal ini seharusnya memiliki sumber daya yang handal dan mempunyai kemauan yang kuat dalam menjalankan implementasi kebijakan akta kelahiran ini dengan cara penyampaian informasi ke tiap-tiap kelurahan yang melibatkan masyarakat didalamnya agar masyarakat mengetahui dan memahami begitu pentingnya akta kelahiran untuk status hukum seseorang dimata hukum. namun fasilitas yang dimiliki kantor sudah cukup untuk melaksanakan kebijakan

pencatatan kelahiran di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

untuk mempermudah dalam mengimplementasikan perda tersebut.

3. Disposisi

Dalam mengimplementasikan Kebijakan pencatatan kelahiran di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sikap penolakan dan penerimaan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan pencatatan kelahiran. Disposisi atau sikap implementor kebijakan terhadap masyarakat sebagai agen pelaksana yang memberikan informasi tentang jadinya akta kelahiran belum baik dilihat tidak ada kepastian informasinya. Namun upaya agen pelaksana terhadap sasaran kebijakan untuk melaksanakan kebijakan masih belum efektif karena ada masyarakat yang dilayani secara tidak baik.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang berjalan dengan baik dan terdapat pembagian tugas yang terstruktur oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun SOP menaungi pelaksanaan Pencatatan kelahiran masih belum efektif dijalankan perlunya koordinasi dari Disdukcapil kekelurahan

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa masukan atau saran agar pelaksana kebijakan pencatatan kelahiran terlebih khusus di Kecamatan Ngabang menjadi lebih baik lagi dan dapat mencapai target akta kelahiran seperti yang telah ditentukan, yakni:

1. Komunikasi

Informasi yang disampaikan Disdukcapil tentang pentingnya akta kelahiran harus rutin dilakukan agar masyarakat lebih memahami tentang manfaat dan pentingnya akta kelahiran, maka proses komunikasi harus berdasarkan mekanisme yang baik yaitu, kejelasan, komunikasi, konsistensi, informasi. Hal ini sangat diperlukan agar informasi yang akan disampaikan tepat sasaran dan dapat dipahami secara baik.

2. Sumber daya

Sumber daya yang berpotensi diperlukan karena dapat memberi dukungan mengenai kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran, sumber daya yang diperlukan adalah yang mempunyai

keahlian atau yang mampu dalam bidangnya sehingga dapat melakukan koordinasi yang baik dan komunikasi secara detail terhadap informasi yang akan disampaikan.

3. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan, jika kita ingin berhasil secara efektif dan efisien, implementor diwajibkan tidak hanya mengetahui apa yang harus dan dilakukan tetapi juga mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut dan mengimplementasikannya secara leluasa. Karena hal ini menyangkut komitmen implementor terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai sebuah komitmen pekerja.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada dalam pengimplementasian program harus tertata dengan baik dan berkesinambungan serta memiliki hierarki yang baik agar pembagian kewenangan dalam setiap bagian organisasi dapat terlaksana secara optimal. Pelaksanaan program dapat terbantu dan dipermudah dengan adanya pembagian tugas serta wewenang dalam pelaksanaannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- , 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Burhan, Bungin. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexi. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosakarya
- Passolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Soegarda, 1981. *Enseklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- , 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- , 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- , 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps Penerbit

----- 2016. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps

Skripsi:

Hidayat. 2017. *Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan Akta Kelahiran Di Desa Sungai Besar Kecamatan Mantan Hilir Kabupaten Ketapang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak

Joan Ria Sindy. 2017. *Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

Undang-Undang:

Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 7 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan